ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN DEBITUR DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PEMBIYAAN KONSUMEN

(Kecamatan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu)

SKRIPSI

Diajukan untuk syarat melengkapi tugas dan memenuhi syarat

untuk mencapai gelar sarjana hukum

Oleh:

SYAMSUL BAHRI
NIM: 2235018

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

FAKULTAS HUKUM

2026

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN DEBITUR DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PEMBIYAAN KONSUMEN

(Kecamatan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu)

SKRIPSI

Oleh :
SYAMSUL BAHRI
NIM. 2235018

Telah disetujui,

Pembimbing I	Pembimbing 2
Siti Rahma SH, MH	Ramadhan Lubis SH, MH
NIDN. 1009069401	NIDN. 1010059501

Pasir Pengaraian, 30 Juli 2026

Mengetahui,
Kepala Program Studi Ilmu Hukum

Almadison, SH, MH, CPLC.,CPCLE
NIDN. 1003118101

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada tanggal 30 bulan juli tahun 2026

Tim Penguji :

Ketua	: Siti Rahma , SH, MH,	;(.....)
Sekertaris	: Ramadhan Lubis SH, MH,	;(.....)
Anggota 1	: Rise Karmilia, SH, M.Hum, Ph.D	;(.....)
Anggota 2	: Zulkifli, SH, MH, C.L.A	;(.....)
Anggota 3	; Rizki Anla Fater, SH, M.Kn	;(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Pasir Pengaraian

Rise Karmilia, S.H., M.H.,Ph.D
NIDN. 1004068502

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Nama	; Syamsul Bahri
Nim	; 2235018
Bidang Minat	; Hukum Perdata
Judul Skripsi	;Analisi Yuridis Terhadap Kewajiban Debitur Dan Batas Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Kecamatan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan penelitian lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, 30 Juli 2026

Yang Membuat Pernyataan;



Syamsul Bahri
NIM. 2235018

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN DEBITUR DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PEMBIYAAN KONSUMEN**". proposal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian sempro pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pasir Pengaraian.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai tantangan. Namun, dengan bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak, proposal skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hardianto, M.Pd Selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Pasir Pengaraian.
2. Ibu Rise Karmilia, SH, M.Hum, Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan dukungan selama masa studi dan selama masa penyusunan proposal ini.
3. Bapak Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah mendidik dan memberikan nasihat.

4. Ibu Siti Rahma , SH, MH, selaku pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan dan juga arahan kepada penulis selama masa penyusunan proposal ini hingga selesai.
5. Bapak Ramadhan Lubis SH, MH, selaku pembimbing ke dua yang telah memberikan bimbingan dan juga arahan kepada penulis selama masa penyusunan proposal ini hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa berharga kepada penulis, semoga jasa Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.
7. Karyawan dan karyawati Bagian Keuangan, Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian, Tata Usaha, Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis.
8. Kepada seluruh pekerja di kantor fif cabang kota tengah, terkhusus bapak Gandi, terima kasih telah meluangkan waktunya dan telah memberikan izin kepada penulis untuk meneliti dan memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Kepada masyarakat kepenuhan hulu, khususnya desa kota tengah terima kasih telah memberikan ruang dan ilmunya kepada penulis sehingga penulis bias mengerjakan skripsi ini dengan waktu yang tepat.
10. Kepada ayah tercinta dan ibu tercinta yang sangat tersayang, yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan doanya kepada penulis dalam setiap

langkah yang selalu mengiringi penulis dan selalu ada dalam titik terendah penulis. semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat kepada Ayahanda dan Ibunda, hanya yang maha Kuasa lah yang dapat membalas atas segala kebaikan dan ketulusan mereka.

11. Terakhir, untuk diri sendiri sebagai penulis, SYAMSUL BAHRI Terima kasih karena telah bertahan hingga sejauh ini. Atas segala peristiwa yang telah dilalui, Penulis mampu bangkit dan tetap menjalani kehidupan dengan bahagia hingga saat ini.

Pasir Pengaraian, 30 Juli 2026

Samsul Bahri
2235018

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI ..... **iii**
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
ABSTRAK ..... **xii**
ABSTRACT ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Batasan Masalah 13
1.3 Rumusan Masalah 14
1.4 Tujuan Penelitian 14
1.5 Manfaat Penelitian 16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori **18**
2.1.1 Teori Perjanjian 18
2.1.2 Teori Perikatan 29
2.1.3 Teori Perlindungan Hukum 32
2.1.4 Teori Keadilan 35
2.1.5 Teori Kepastian Hukum 37
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Konsumen **39**
2.2.1 Pengertian Pembiayaan Konsumen 39
2.2.2 Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen 40
2.2.3 Unsur-unsur Pembiayaan Konsumen 41
2.3 Tinjauan Umum Tentang Debitur **42**
2.3.1 Pengertian Debitur 42
2.3.2 Kedudukan Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan 44
2.3.3 Kewajiban dan Hak Debitur 46
2.4 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi .....
2.4.1Pengertian Wanprestasi 50

2.4.2 Bentuk Wanprestasi 53
2.4.3 Akibat Hukum Wanprestasi 54
2.4.4 Force Majeure 56
2.5 Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia 56
2.5.1 Pengertian Jaminan Fidusia 56
2.5.2 Asas-Asas Jaminan Fidusia 58
2.5.3 Pendaftaran dan Eksekusi jaminan Fidusia 60
2.5.6 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 65
2.6 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen 67
2.6.1 Pengertian Perlindungan Konsumen 67
2.6.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 67
2.6.3 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 70
2.6.4 Hak dan Kewajiban Konsumen 72
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Metode yuridis empiris 74
3.2 Pendekatan Penelitian 74
3.3 Jenis Dan Sumber Data 75
3.4 Teknik Pengumpulan Data 75
3.4.1 Wawancara 75
3.4.2 Observasi 76
3.4.3 Studi Kepustakaan 76
3.4.4 Studi Dokumentasi 77
3.5 Teknik Analisis Data 77
3.6 Lokasi dan subjek penelitian 77
3.7 Populasi, Sampel, Dan Teknik Sampling 77
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 79
4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu 79
4.2 Pelaksanaan hak dan kewajiban debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen 82

4.3 Kewenangan Perusahaan Pembiayaan Dalam Melakukan Penarikan Kenadaraan Terhadap Debitur Yang Wanprestasi 93
4.4 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Debitur Aapabila Penarikan Kendaraan Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan 99
4.4.1 Perlindungan Hukum Preventif 100
4.4.2 Perlindungan Hukum Represif 101
4.4.3 Perlindungan Hukum Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 103
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan 119
5.2 Saran 120
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Contoh Perusahaan Pembiayaan dan Kendaraan yang Ditarik 9

Tabel 3.1 Populasi Sampel 77

ABSTRAK

Perjanjian pembiayaan konsumen pada dasarnya merupakan suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, yaitu perusahaan pembiayaan yang berkedudukan sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur. Dalam pelaksanaannya, tidak semua debitur dapat memenuhi kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan, sehingga mengakibatkan terjadinya wanprestasi yang kemudian dapat menjadi alasan bagi perusahaan pembiayaan untuk melakukan penarikan terhadap objek jaminan. Akan tetapi, pelaksanaan penarikan tersebut dalam praktik sering kali menimbulkan perselisihan apabila tidak dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Atas dasar itu, diperlukan suatu kajian mengenai kewajiban debitur beserta batas-batas perlindungan hukum yang diberikan dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai hak dan kewajiban debitur dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor, menganalisis batas kewenangan perusahaan pembiayaan dalam melakukan penarikan kendaraan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada debitur apabila penarikan kendaraan dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi. Data primer diperoleh dari debitur dan pihak perusahaan pembiayaan, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan, literatur berupa buku, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan kewajiban debitur serta batas perlindungan hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Kata Kunci: kewajiban debitur, perlindungan hukum, pembiayaan konsumen, jaminan fidusia, wanprestasi.

ABSTRACT

A consumer financing agreement essentially establishes a legal relationship creating rights and obligations for both parties: the financing company acting as the creditor and the consumer acting as the debtor. In practice, not all debtors fulfill their agreed-upon obligations, resulting in a breach of contract; this breach can serve as grounds for the financing company to repossess the collateral. However, the repossession process often leads to disputes if not conducted in accordance with applicable legal procedures and regulations. Consequently, there is a need to examine debtor obligations and the scope of legal protection afforded within consumer financing agreements. This research aims to examine the legal regulations governing debtor rights and obligations in motor vehicle financing agreements, analyze the limits of a financing company's authority to repossess vehicles from defaulting debtors, and assess the forms of legal protection available to debtors when repossession is carried out in a manner inconsistent with statutory provisions. The study employs an empirical-juridical research method with a descriptive-analytical approach. Data collection involved interviews, observation, literature reviews, and document analysis. Primary data were obtained from debtors and financing companies, while secondary data were derived from relevant legislation, academic literature (books and journals), and court rulings. All collected data were subsequently analyzed using qualitative methods. This research seeks to provide a deeper understanding of the fulfillment of debtor obligations and the limits of legal protection in consumer financing agreements, based on the provisions of the Indonesian Civil Code, Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019.

Keywords: debtor obligations, legal protection, consumer financing, fiduciary guarantee, default.